

**PENINGKATAN KERJASAMA PERTAHANAN INDONESIA DIKAWASAN  
ASIA TENGGARA GUNA Mendukung DIPLOMASI PERTAHANAN  
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN STABILITAS KAWASAN**

**Mayor Laut (P) Salim**  
Kasubdit Kerjasama  
Pusat Pengkajian Maritim, Seskoal

***Abstract** Indonesia, as one of the key countries for the regional security and stability in South East Asia, must always improve its defense diplomacy in order to stay abreast with developing threats and challenges. Related to that, Indonesia's defense cooperation should be able to play a larger part in projecting national interests. To achieve this, improvements must be in the area of human resources quality, equipment capability, and policy evaluation as the mainstays of defense diplomacy to build regional stability.*

*The steps to optimize Indonesia's defense cooperation within South East Asia's framework require inter-agency cooperation that will include the Defense Ministry, Foreign Ministry and TNI. One of the most important things to develop is a common perception on defense cooperation. Defense ministry and TNI should periodically evaluate existing defense cooperation policies. Externally, Defense Ministry must continuously synchronize defense cooperation policies with foreign policies being developed by the Foreign Ministry.*

**1. Pendahuluan.**

a. Stabilitas kawasan merupakan kepentingan bersama bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk Asia Tenggara. Terjaganya stabilitas kawasan akan memberikan keuntungan bagi semua negara kawasan, baik dari aspek politik, ekonomi maupun keamanan. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan senantiasa berupaya menjaga stabilitas keamanan yang telah dinikmati pasca Perang Dingin. Bagi negara-negara kawasan Asia Tenggara, stabilitas keamanan merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Kawasan Asia Tenggara kini menghadapi tantangan terhadap stabilitas kawasan dalam beragam sumber, satu di antaranya adalah sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Pemerintah China

berharap Amerika Serikat dan Filipina dapat lebih berkontribusi dalam menciptakan situasi yang kondusif di kawasan khususnya di Laut China Selatan. Kementerian Luar Negeri China dalam keterangan persnya di Beijing mengatakan bahwa, China berharap kedua pihak dapat memberikan kontribusi bagi situasi yang kondusif di kawasan dengan menjaga perdamaian dan stabilitas dilandasi rasa saling percaya.<sup>1</sup> Oleh karena itu diperlukan diplomasi pertahanan dalam hubungan antar bangsa untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas kawasan dalam menghadapi permasalahan yang ada agar eskalasi tidak meningkat kearah konflik. Peran aktif kerjasama pertahanan Indonesia dikawasan Asia Tenggara sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas kawasan.

b. Pada saat ini diplomasi pertahanan di kawasan Asia Tenggara terus meningkat. Negara-negara di kawasan terus memperkuat kinerja diplomasi pertahanan dengan negara-negara lain dalam berbagai bentuk kerjasama, baik secara bilateral maupun multilateral. Bahkan negara-negara non Asia Tenggara memperkuat pula diplomasi pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Diplomasi pertahanan ditujukan untuk saling memperkuat *confidence building measure* (CBM) dan sekaligus memperkuat stabilitas kawasan.<sup>2</sup> Melalui diplomasi pertahanan akan dapat mendukung upaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Diplomasi pertahanan saat ini menjadi bagian yang penting dalam hubungan strategis di kawasan. Oleh Karena itu diperlukan kerjasama antar negara kawasan dalam hal sinkronisasi kebijakan masalah kerjasama pertahanan antar negara. Untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas kawasan bisa diawali dengan kerja sama pertahanan dan keamanan antar negara di kawasan, serta dimasa depan diplomasi pertahanan akan semakin penting untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan dalam lingkup regional maupun internasional. Diplomasi pertahanan Indonesia masih mengalami beberapa kendala diantaranya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia pertahanan, terbatasnya kemampuan alat sista pertahanan dan belum adanya evaluasi kerjasama pertahanan oleh Kementerian Pertahanan.

c. Sejak tahun 1970-an Indonesia telah menggagas berbagai kerjasama pertahanan dengan negara-negara Asia Tenggara. Kerjasama tersebut lebih

---

<sup>1</sup> <http://id.berita.yahoo.com/china-harapkan-filipina-jaga-stabilitas-kawasan-155720676.html> diakses pada tanggal 04 Juli 2012 Pukul 21.00 WIB

<sup>2</sup> [http://www.dephan.go.id/buku\\_putih/bab\\_v.htm](http://www.dephan.go.id/buku_putih/bab_v.htm) diakses pada tanggal 15 Mei 2012 Pukul 05.00 WIB

menitikberatkan pada kerjasama pertahanan bilateral, melalui operasi dan latihan, intelijen, logistik dan personel. Selain dengan negara-negara Asia Tenggara, Indonesia menjalin pula kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain di luar kawasan Asia Tenggara. Pengembangan kerjasama pertahanan oleh Indonesia selain dimaksudkan untuk memperkuat CBM, juga ditujukan untuk membangun dan memperkuat kekuatan pertahanan Indonesia. Kerjasama pertahanan dalam bingkai diplomasi pertahanan Indonesia kinerjanya akan lebih optimal di kawasan kalau disertai dukungan peningkatan sumber daya manusia pertahanan sendiri, didukung dengan kemampuan alut sista yang baik serta dengan adanya evaluasi kebijakan kerjasama pertahanan itu sendiri. Diharapkan melalui peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia di kawasan Asia Tenggara guna mendukung diplomasi pertahanan dalam rangka mewujudkan stabilitas kawasan dapat terwujud.

2. **Kerjasama Pertahanan Saat ini dan Permasalahannya.** Kerjasama pertahanan yang dilaksanakan merupakan implementasi dari diplomasi pertahanan Indonesia di kawasan. Terkait hal tersebut, sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam kerjasama pertahanan akan mempengaruhi terhadap diplomasi pertahanan. Kerjasama pertahanan Indonesia yang merupakan bagian dari diplomasi pertahanan memiliki cakupan pada *CBM, preventive diplomacy dan conflict resolution*.<sup>3</sup> Hal itu menunjukkan bahwa kerjasama pertahanan Indonesia tidak ditujukan untuk menghadapi satu atau beberapa negara tertentu yang dianggap sebagai lawan, akan tetapi ditujukan untuk menjaga stabilitas kawasan. Sebab isu-isu *CBM, preventive diplomacy dan conflict resolution* pada dasarnya sangat terkait dengan stabilitas kawasan. Dalam kondisi saat ini akan diberikan gambaran tentang kerjasama pertahanan bilateral dan multilateral dalam bentuk operasi, latihan, pendidikan, pengadaan alutsista maupun industri pertahanan.

a. **Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Operasi.** Kerjasama operasi yang dilaksanakan oleh Indonesia dalam hal ini TNI dengan negara-negara lain masih relatif terbatas. Sampai saat ini, kerjasama operasi yang terjalin mencakup Patroli Terkoordinasi Indonesia-Malaysia di Selat Malaka, Patroli Terkoordinasi Indonesia-Singapura di Selat Singapura, Patroli Terkoordinasi Indonesia-Filipina di Laut Sulawesi, Patroli Terkoordinasi Indonesia-India di Laut Andaman dan Patroli

---

<sup>3</sup> <http://www.thejakartapost.com/news/2009/12/15/arf-experts-design-work-plan-preventive-diplomacy.html>, diakses pada tanggal 1 April 2012 pukul 15.10 WIB

Terkoordinasi Indonesia-Australia di Laut Arafuru.<sup>4</sup> Kerjasama operasional yang dilaksanakan oleh Indonesia selama ini lebih banyak terpusat pada negara-negara yang berbatasan langsung dan terfokus pada isu-isu keamanan non tradisional seperti keamanan maritim, penyelundupan manusia dan lain sebagainya. Pada tingkat Angkatan Bersenjata, kerjasama pertahanan multilateral yang sudah dilaksanakan oleh Indonesia mencakup patroli terkoordinasi, latihan bersama, pertukaran intelijen dan pemeliharaan perdamaian. Untuk patroli terkoordinasi, sejauh ini yang bersifat multilateral adalah *The Malacca Straits Security Patrol*. Adapun pertukaran intelijen telah pula dilaksanakan secara multilateral, misalnya pertukaran intelijen keamanan maritim lewat *Information Fusion Center* di mana Indonesia juga terlibat di dalamnya. Sedangkan kerjasama pemeliharaan perdamaian adalah partisipasi Indonesia dalam beberapa misi pemeliharaan perdamaian PBB, termasuk dalam *UNIFIL Maritime Task Force*. Dengan adanya kantor PMPP yang berada di sentul menunjukkan bahwa peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia lewat pasukan PBB dapat diwujudkan baik dalam lingkup kawasan maupun dalam lingkup Internasional. Dalam interaksi tersebut diperlukan kualitas sumber daya manusia pertahanan yang handal dan mumpuni untuk bisa menjalankan koordinasi dan kerjasama dalam operasi bersama yang akan dilaksanakan baik pada kerjasama kawasan Asia Tenggara maupun Internasional.

b. **Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Latihan.** Indonesia sejak lama telah menggagas dan melaksanakan latihan bersama dengan Angkatan Bersenjata negara-negara lain. Kalau di masa lalu kerjasama latihan bersama yang dilaksanakan oleh Indonesia lebih diutamakan pada latihan bersama dengan satu negara, sejak beberapa tahun silam Indonesia sudah terlibat aktif dalam latihan bersama beberapa negara. Latihan bersama dilaksanakan oleh ketiga matra TNI dengan mitra masing-masing, misalnya *Latma Indosin* antara TNI Angkatan Laut dengan *Republic of Singapore Navy*, *Elang Thainesia* antara TNI Angkatan Udara dengan *Royal Thai Air Force* dan *Darsasa Malindo* antara TNI dengan *Tentera Diraja Malaysia*. Adapun latihan bersama beberapa negara yang telah diikuti oleh TNI seperti *Cobra Gold*, *Kakadu* dan *RIMPAC*. Latihan rutin antara TNI dengan *Australian Defence Force (ADF)* pada ketiga matra seperti *New Horizon* dan *Rajawali Ausindo*, Latihan *CARAT* antara TNI AL dengan Angkatan Laut Amerika

---

<sup>4</sup> <http://www.antaraneews.com/print/1144140449/panglima-tni-kerjasama-militer-ri-australia-tetap-baik> diakses pada tanggal 20 Mei 2012 pukul 19.00 WIB.

Serikat, Latihan Darsasa Malindo antara Indonesia-Malaysia, Passex dan lain sebagainya adalah beberapa latihan antar negara yang dilaksanakan oleh Indonesia dengan negara-negara mitra.<sup>5</sup> Dalam kerjasama pertahanan bentuk latihan ini masih ditemukan adanya kesalahan atau kurang pahaman proses perencanaan yang di mulai dari *Initial Planing Conference* sampai pada pelaksanaan latihan, hal ini karena kurang meratanya kemampuan personel dalam berkomunikasi atau berkoordinasi saat pelaksanaan latihan dengan menggunakan bahasa inggris. Disisi lain evaluasi kebijakan khususnya yang berkaitan dengan latihan masih belum optimal dan hanya sebagai pelengkap latihan.

c. **Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Pendidikan.** Dibidang pendidikan, sejak lama Indonesia telah menjalin kerjasama di bidang pendidikan militer. Dalam kerjasama itu, pada umumnya berlaku asas resiprokal di mana selain TNI mengirimkan perwira siswa untuk menempuh pendidikan militer di lembaga pendidikan negara mitra kerjasama, TNI juga menerima perwira siswa dari negara mitra itu guna mengikuti pendidikan militer di lembaga pendidikan TNI. Dewasa ini, sejumlah negara telah menjadi mitra Indonesia dalam kerjasama pendidikan militer, seperti Amerika Serikat, Australia, sebagian negara-negara ASEAN, Cina, India, Korea Selatan dan lain sebagainya. Terkait dengan kerjasama pendidikan itu, beberapa negara memberikan fasilitas pembiayaan khusus kepada Indonesia seperti *International Military Education and Training (IMET)* yang dibiayai oleh anggaran pertahanan Amerika Serikat.<sup>6</sup> Sebagaimana kerjasama pertahanan antar negara, pada tingkat internasional terbagi antara tingkat Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata. Untuk tingkat Kementerian Pertahanan, kerjasama pertahanan multilateral yang selama ini dilaksanakan oleh Indonesia mencakup *ASEAN Defense Minister Meeting (ADMM)*, *ASEAN Defense Minister Meeting Plus (ADMM Plus)* dan *ASEAN Regional Forum (ARF)*. Baik dalam ADMM, ADMM Plus maupun ARF, selain terdapat forum untuk pertemuan tingkat Menteri dan pejabat senior, juga terdapat sejumlah kelompok kerja (*working group*) yang membahas isu-isu keamanan seperti keamanan maritim, *humanitarian assistance and disaster relief (HADR)*, *counter terrorism*, pemeliharaan perdamaian dan lain sebagainya. Dalam kerjasama bentuk pendidikan ini masih ditemukan kemampuan personel pertahanan yang belum dapat berinteraksi dan berkoordinasi dengan baik khususnya pada level bawah. Pada saat selesai pelaksanaan kerjasama

---

<sup>5</sup> [http://indonesiandefense.blogspot.com/2010/09/melihat-pertahanan-dan-kekuatan\\_04.html](http://indonesiandefense.blogspot.com/2010/09/melihat-pertahanan-dan-kekuatan_04.html)  
diakses pada tanggal 01 Juli 2012 Pukul 20.00 WIB

<sup>6</sup> [www.dpr.go.id/.../K1\\_kunjungan\\_Negara\\_Amerika](http://www.dpr.go.id/.../K1_kunjungan_Negara_Amerika) diakses pada tanggal 29 Mei 2012 Pukul 22.00 WIB.

pertahanan dalam bentuk pendidikan evaluasi peserta maupun materi pendidikan masih belum dilaksanakan dengan baik.

d. **Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Pengadaan Alutsista.** Bentuk kerjasama pertahanan lainnya adalah pengadaan alutsista. Bila di masa lalu Indonesia dalam kerjasama ini lebih banyak sebagai negara penerima, kini Indonesia sudah pula menjadi negara pemberi/pengekspor alutsista. Pengadaan alutsista dewasa ini terjalin dengan Amerika Serikat, Belanda, Rusia, Korea Selatan dan beberapa negara lainnya. Beberapa negara lain seperti Korea Selatan, Filipina, Malaysia dan Pakistan pun sekarang telah menjadi penerima alutsista buatan Indonesia. Dewasa ini Indonesia memiliki kerjasama pertahanan hampir dengan semua negara di kawasan Asia Pasifik. Misalnya dengan Australia yang dipayungi oleh *The Lombok Agreement*, dengan Amerika Serikat yang mengacu pada *Indonesia-United States Comprehensive Partnership* dan dengan RRC yang dicakup dalam *Indonesia-PRC Strategic Partnership*.<sup>7</sup>

e. **Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Industri Pertahanan.** Indonesia saat ini tengah berupaya untuk membangkitkan kembali industri pertahanan nasional yang mengalami kemunduran akibat krisis ekonomi 1997. Untuk itu, Indonesia terus berupaya menjalin kerjasama industri pertahanan dengan negara-negara yang sudah lebih dahulu maju di bidang ini, seperti Korea Selatan, Belanda, Australia, India dan lain sebagainya. Namun demikian, kerjasama yang diharapkan akan berkuat pada alih teknologi itu belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena kendala kebijakan maupun kesiapan teknis industri pertahanan itu sendiri. Pada kerjasama tingkat Kementerian Pertahanan, kerjasama bilateral mencakup dialog pertahanan pada tingkat Menteri dan pejabat senior, kelompok kerja (*working group*) atas isu tertentu yang disepakati, pengadaan alutsista, kerjasama industri pertahanan dan pertukaran kunjungan.<sup>8</sup>

f. **Permasalahan yang dihadapi.** Mengacu pada diplomasi pertahanan Indonesia, terdapat sejumlah masalah yang dihadapi oleh diplomasi pertahanan saat ini. Masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> <http://www.kemlu.go.id/sanfrancisco/Pages/News.aspx?IDP=5544&l> diakses pada tanggal 4 Mei 2012 Pukul 17.30 WIB.

<sup>8</sup> [http://indonesiandefense.blogspot.com/2011\\_05\\_15\\_archive.html](http://indonesiandefense.blogspot.com/2011_05_15_archive.html) diakses pada tanggal 01 Juli 2012 pukul 19.30 WIB.

1) **Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pertahanan.**

Menurunnya kualitas sumberdaya manusia pertahanan dalam melaksanakan diplomasi, bukan saja terkait dengan kemampuan penguasaan bahasa asing, tetapi mencakup pula bekal-bekal akademis dan pengetahuan-pengetahuan lainnya untuk mendukung tercapainya tujuan diplomasi pertahanan. Akibatnya, seringkali Indonesia berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam diplomasi pertahanan karena masalah kualitas sumberdaya manusia tersebut. Disamping itu dengan adanya penurunan terhadap kualitas sumber daya manusia pertahanan berakibat masih adanya pandangan yang kurang tepat terhadap kerjasama pertahanan multilateral. Pandangan yang tidak tepat, bahkan alergi, terhadap kerjasama pertahanan multilateral masih kuat di Indonesia. Akibatnya Indonesia kesulitan untuk mengusulkan pengembangan-pengembangan baru dalam kerjasama pertahanan multilateral yang bersifat inovatif dan keluar dari paradigma yang selama ini dianut. Tidak aneh bila kerjasama pertahanan Indonesia lebih banyak berfokus pada pola bilateral.

2). **Terbatasnya Kemampuan Alutsista Pertahanan.**

Kerjasama pertahanan yang dilaksanakan oleh Indonesia selama ini mencakup pula kerjasama di bidang operasi dan latihan. Untuk jenis kerjasama ini, keterlibatan alutsista TNI merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Namun karena keterbatasan kemampuan unsur alutsista TNI yang dalam kondisi siap operasi dan bertempur, maka kegiatan-kegiatan kerjasama di bidang operasi dan latihan dengan negara-negara lain belum optimal. Tidak jarang suatu unsur alutsista TNI yang tengah dalam kondisi siap operasi dan bertempur harus terlibat dalam rangkaian kegiatan operasi dan latihan dengan beberapa negara mitra secara berurutan. Terbatasnya kemampuan alutsista juga mempengaruhi uji kemampuan alutsista dengan berbagai macam skenario dalam latihan bersama dengan negara-negara lain. Hal lainnya yang juga terpengaruh adalah terbatasnya kesempatan bagi personel TNI untuk menguji kemampuan alutsista secara optimal karena keterbatasan kemampuan alutsista tersebut.

3). **Belum Adanya Evaluasi Kebijakan Diplomasi Pertahanan.**

Kebijakan diplomasi pertahanan telah dilaksanakan oleh Indonesia sejak puluhan tahun silam dan terus meningkat dalam satu dekade terakhir.

Peningkatan diplomasi pertahanan dalam satu dekade terakhir sangat dipengaruhi oleh menguatnya kerjasama pertahanan antar negara guna merespon ancaman dan tantangan yang bersifat multidimensi, termasuk ancaman non tradisional. Namun disayangkan, perkembangan demikian belum diikuti oleh kegiatan evaluasi kebijakan diplomasi pertahanan Indonesia. Pada masa silam, kegiatan diplomasi pertahanan terkesan hanya sebagai pelengkap diplomasi Indonesia saja. Akan tetapi dalam kondisi dunia yang kekinian, diplomasi pertahanan telah memainkan peran yang jauh lebih besar dan tidak bisa lagi dipandang sebagai pelengkap belaka. Karena diplomasi pertahanan adalah bagian tidak terpisahkan dari diplomasi Indonesia secara keseluruhan.

### 3. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Strategis.

a. **Dinamika Interaksi Global.** Amerika Serikat, Cina, Rusia, Prancis, dan Inggris merupakan Lima negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB, sampai saat ini masih menjadi kekuatan yang memiliki pengaruh besar terhadap keamanan dunia dan kawasan. juga terdapat kekuatan kolektif kawasan yang terus menunjukkan kinerjanya, seperti Uni Eropa dan ASEAN. Negara-negara di Eropa yang umumnya maju di bidang ekonomi, teknologi dan militer merupakan kekuatan kolektif dari Uni Eropa, sedangkan ASEAN sebagai kekuatan kolektif di kawasan Asia Tenggara terus berusaha membangun soliditas sesama anggota, bahkan memperluas kemitraannya dengan negara-negara di luar kawasan. Dinamika interaksi global juga berimplikasi terhadap tantangan keamanan nasional dengan mengemukanya isu-isu keamanan baru yang berdimensi ancaman keamanan lintas negara. Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas ancaman keamanan lintas negara menunjukkan angka yang cukup signifikan dan telah mengancam ketenangan dan kenyamanan hidup manusia. Perkembangan interaksi global tersebut akan mempengaruhi kerjasama pertahanan dan diplomasi pertahanan antar negara sebagai akibat meningkatnya isu keamanan lintas negara.

b. **Aspek Pertahanan Dan Keamanan Global.** Pada aspek pertahanan dan keamanan di mana perkembangan global memberikan pengaruh bentuk ancaman dengan munculnya bentuk keamanan baru yang mengutamakan penyelesaian dengan pendekatan secara komprehensif dan integratif, bentuk keamanan tersebut, antara lain, adalah terorisme, ancaman keamanan lintas negara, dan



proliferasi senjata pemusnah massal. Munculnya isu keamanan baru tidak terlepas dari globalisasi, kemajuan teknologi informasi, identitas primordial, serta penguatan peran aktor non-negara. Bagi negara-negara berkembang, isu keamanan baru banyak dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang kebanyakan masih berada dalam kategori miskin, pendidikan yang rendah dan terbelakang. Perkembangan pertahanan dan keamanan global akan sangat mempengaruhi stabilitas kawasan khususnya kerjasama pertahanan dan diplomasi pertahanan antar negara.

c. **Isu Terorisme.** Peristiwa serangan teroris tanggal 11 September 2001 telah mengubah paradigma tentang keamanan global. Ancaman terorisme telah merubah konsep dalam menghadapi terorisme, konsep lama mengedepankan pendekatan konvensional adapun konsep baru yang lebih komprehensif. Munculnya aksi teroris telah mempengaruhi hubungan antar negara dengan semakin menguatnya kerja sama di bidang pertahanan yang menempatkan penanganan isu terorisme sebagai agenda utama. Di bidang penyelenggaraan pertahanan, isu terorisme menyebabkan permasalahan baru dengan bentuk ancaman seperti ancaman nyata, terorisme mengancam jiwa manusia dan mengancam kehormatan negara. Yang dimaksud dengan ancaman nyata adalah terorisme menghadirkan ketidakpastian tentang kapan dan di mana aksi teror akan terjadi sehingga menuntut kesiapsiagaan kekuatan nasional yang harus selalu waspada untuk menghadapinya. Dalam perspektif pertahanan negara, terorisme menjadi ancaman keselamatan bangsa sehingga menjadi bagian dari tugas dan fungsi pertahanan negara. Implikasi dari isu terorisme akan mempengaruhi kerjasama pertahanan antar negara khususnya dalam hal penanggulangannya guna untuk menciptakan stabilitas kawasan yang damai.

d. **Konflik Laut China Selatan.** Cina kini telah bangkit sebagai kekuatan baru, baik di bidang politik, ekonomi maupun militer. Sebagai kekuatan baru, negeri itu mempunyai aspirasi untuk mengembangkan Angkatan Laut yang mampu untuk diproyeksikan jauh dari wilayahnya. Pembangunan Angkatan Laut Cina berada dalam bingkai kebijakan pemerintah Cina untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, menjaga stabilitas politik dalam negeri, mempertahankan kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Cina dan mengamankan status Cina sebagai kekuatan besar.<sup>9</sup> Sudah ada kesepakatan pandangan negara-negara di

---

<sup>9</sup> U.S. Department of Defense, *Annual Report to Congress: Military Power of the People's Republic of China 2009*, hal.2

kawasan bahwa pembangunan kekuatan laut Cina bukan sekedar untuk menghadapi masalah Taiwan, tetapi *beyond Taiwan*.<sup>10</sup> Selain karena aspek ekonomi yaitu untuk melindungi SLOC-nya, pembangunan kekuatan laut Cina tak lepas pula dari strategi *Offshore Defense* yang kini dianut oleh Angkatan Laut Cina. *Offshore Defense* merupakan konsep strategis yang mengarahkan Angkatan Laut Cina untuk bersiap memenuhi tiga misi kunci “untuk periode baru” melalui pelibatan dalam operasi-operasi maritim di laut dan membangun Angkatan Laut yang mampu melaksanakan operasi berkelanjutan di laut. Tiga misi kunci yang diemban oleh Angkatan Laut Cina yaitu,<sup>11</sup> (i) menjaga musuh dalam batas dan menolak invasi dari laut, (ii) melindungi kedaulatan teritorial nasional dan (iii) menjaga keutuhan ibu pertiwi dan hak-hak maritime. Apabila kini dikenal istilah *two island chains* yang terdiri dari *first island chain* dan *second island chain*, hal itu seringkali membingungkan bagi pihak asing ketika mengaitkannya dengan *Offshore Defense*. Penting untuk dipahami bahwa kini *Offshore Defense* tidak lagi terkait batas geografis tertentu seperti di era lalu. Strategi itu kini telah berevolusi dan mengacu pada pernyataan Presiden Jiang Zemin pada tahun 1997 bahwa Angkatan Laut Cina “harus fokus pada memunculkan kemampuan tempur komprehensif di lepas pantai dalam *first island chain*, harus meningkatkan penangkalan konvensional dan nuklir dan kemampuan serangan balik, dan harus secara bertahap membangun kemampuan tempur untuk pertahanan samudera jauh”.<sup>12</sup> ASEAN sebagai organisasi kawasan baru menyentuh isu keamanan pada 2003 setelah dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-9 pada tanggal 7-8 Oktober di Bali. Dalam KTT tersebut, disepakati *Bali Concord II* yang antara lain mengatur tentang pembentukan *ASEAN Community*. Satu di antara bidang kerjasama yang dicakup dalam *ASEAN Community* adalah keamanan dalam wadah *ASEAN Security Community* (ASC). AMF adalah wadah yang disediakan dalam ASC untuk membahas kerjasama maritim, termasuk menyangkut isu keamanan maritim. Nampak jelas bahwa dari uraian diatas konflik yang terjadi di Laut China Selatan sangat mempengaruhi stabilitas kawasan khususnya hubungan kerjasama pertahanan antar negara yang terlibat konflik dalam mempertahankan kepentingan masing – masing negara.

**h. Keadaan Indonesia khususnya bidang Pertahanan dan Keamanan.**  
Gerakan separatis masih menjadi isu keamanan dalam negeri, bermacam bentuk

<sup>10</sup>. Ibid, hal.28

<sup>11</sup>. Office of Naval Intelligence, *China's Navy 2007*, hal.25

<sup>12</sup>.Office of Naval Intelligence, *China's Navy 2007*, hal.26

gerakan separatis politik maupun gerakan separatis bersenjata, gerakan yang bertujuan untuk melepaskan diri dari NKRI dengan cara mengeksploitasi dan memanfaatkan kelemahan penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Saat ini Indonesia menempatkan separatisme sebagai ancaman yang serius dan berbahaya karena secara langsung mengancam keutuhan wilayah NKRI dan mengancam keselamatan bangsa. Konflik komunal yang dilandasi kepentingan pada umumnya berakar dari fanatisme suku, daerah, agama, golongan, kedewasaan berpolitik yang masih rendah, benturan kepentingan antar golongan, serta faktor ketidakadilan dalam penegak hukum. Konflik komunal yang menimbulkan korban dalam beberapa tahun terakhir telah menambah keterpurukan negara. Konflik itu merupakan tantangan yang harus dicegah dan dipecahkan. Dalam konteks maritim, Indonesia sebagai anggota warga internasional dituntut untuk mampu mengamankan wilayah perairan yurisdiksinya dari segala ancaman dan tantangan. Sebab ketidakstabilan di wilayah perairan tersebut akan berkontribusi negatif terhadap politik, ekonomi dan keamanan kawasan. Selain itu, Indonesia juga dituntut untuk mampu mengamankan sejumlah perairan perbatasan yang masih menjadi sengketa dengan negara lain, termasuk perairan Laut Sulawesi (Blok Ambalat). Sebagaimana diketahui, sebagian besar potensi sumberdaya energi Indonesia berada di lautan yang juga menarik minat negara lain untuk mengendalikan dan mengelolanya. Mengalir dari uraian diatas faktor pertahanan dan keamanan sangatlah penting dalam meningkatkan kerjasama pertahanan Indonesia dikawasan serta proses penyelesaian permasalahan klaim perbatasan antar negara.

#### **4. Kerjasama Pertahanan Yang di Harapkan.**

a. **Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Operasi Lebih Luas.** Kerjasama operasi yang dilaksanakan oleh Indonesia dalam hal ini TNI dengan negara-negara lain harus ditingkatkan cakupannya dan tidak terbatas pada negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Selain kerjasama operasi yang terjalin seperti Patroli Terkoordinasi Indonesia-Malaysia di Selat Malaka, Patroli Terkoordinasi Indonesia-Singapura di Selat Singapura, Patroli Terkoordinasi Indonesia-Filipina di Laut Sulawesi, Patroli Terkoordinasi Indonesia-India di Laut Andaman dan Patroli Terkoordinasi Indonesia-Australia di Laut Arafuru, Indonesia perlu memperluas kerjasama operasi di luar wilayah Indonesia dengan fokus pada keamanan non tradisional. Sebagai contoh, Indonesia dapat menggelar kerjasama

operasi dengan Angkatan Laut Singapura, Malaysia dan Thailand dalam rangka menghadapi ancaman pembajakan di perairan Somalia. Begitu pula dengan peningkatan partisipasi Indonesia dalam beberapa misi pemeliharaan perdamaian PBB, termasuk dalam *UNIFIL Maritime Task Force*. Peningkatan partisipasi itu bukan saja dalam bentuk peningkatan jumlah personel yang terlibat dalam operasi perdamaian, tetapi juga pengiriman alutsista seperti helikopter dan pesawat angkut untuk mendukung operasi tersebut.

b. **Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Latihan Meningkatkan.** Kerjasama pertahanan dalam bentuk latihan perlu ditingkatkan, khususnya latihan multilateral. Dalam hal ini, Indonesia sebaiknya bukan saja berpartisipasi aktif dalam latihan bersama multilateral seperti *Cobra Gold*, *Kakadu* dan *RIMPAC*, namun turut pula menggagas suatu latihan multilateral yang diselenggarakan di Indonesia. Dengan berperan sebagai penggagas dan tuan rumah latihan multilateral, Indonesia memiliki kesempatan untuk menentukan skenario latihan yang sesuai dengan kepentingan Indonesia sendiri. Adapun fase-fase dalam latihan multilateral itu bukan saja fase operasi militer perang, tetapi mencakup pula fase operasi militer selain perang. Sebagai contoh, salah satu skenario operasi militer selain perang adalah latihan *HADR*. Adapun menyangkut kerjasama pertahanan bilateral, intensitas latihan yang pada umumnya hanya berlangsung sekali setahun hendaknya ditingkatkan menjadi dua kali setahun. Hal demikian bukan saja lebih meningkatkan interaksi kerjasama bilateral, tetapi berkontribusi pula pada penguatan CBM di kawasan.

c. **Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Pendidikan Meningkatkan.** Kerjasama pertahanan di bidang pendidikan perlu diperluas dengan cara memperluas mitra kerjasama sama. Indonesia sebaiknya memperjuangkan diperbesarnya kuota bagi perwira siswa untuk menempuh pendidikan militer di lembaga pendidikan negara mitra kerjasama seperti Amerika Serikat, Australia, sebagian negara-negara ASEAN, Cina, India, Korea Selatan dan lain sebagainya. Dengan penambahan kuota, diharapkan perwira TNI yang dikirimkan bukan saja untuk tingkat Sesko Angkatan, Sesko TNI atau setara dan Lemhannas atau setara, tetapi mencakup pula berbagai jenis kursus yang terkait dengan tataran taktis. Misalnya kursus peperangan kapal selam, kursus peperangan jarak jauh dan lainnya. Karena menganut asas resiprokal, sebagai konsekuensinya Indonesia harus siap pula menyediakan kursi bagi negara-negara mitra kerjasama bagi pengiriman

perwira siswa mereka untuk kursus-kursus tertentu di lembaga pendidikan TNI. Adapun untuk kerjasama pertahanan pada tingkat multilateral, forum seperti *ASEAN Defense Minister Meeting (ADMM)*, *ASEAN Defense Minister Meeting Plus (ADMM Plus)* dan *ASEAN Regional Forum (ARF)* hendaknya dimanfaatkan oleh Indonesia lewat promosi kerjasama pendidikan. Dengan kata lain, forum-forum tersebut sebaiknya tidak hanya membahas isu multilateral yang bersifat *hard*, tetapi juga membicarakan tentang isu multilateral yang bersifat lunak seperti inisiatif kerjasama pendidikan multilateral.

d. **Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Pengadaan Alutsista Berimbang.**

Indonesia perlu meningkatkan kerjasama pertahanan dalam bentuk pengadaan alutsista dalam suatu neraca yang berimbang. Yang dimaksud dengan neraca berimbang yaitu terdapat perimbangan antara status Indonesia sebagai negara penerima alutsista dengan status Indonesia sebagai negara pengekspor alutsista. Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk memberdayakan industri pertahanan nasional, produk-produk industri pertahanan tersebut hendaknya memiliki kualitas internasional sehingga mampu bersaing di pasar antar bangsa. Dengan demikian, alutsista buatan industri pertahanan nasional bukan saja diproduksi untuk digunakan oleh TNI, tetapi dapat pula dikonsumsi oleh negara-negara lain. Diharapkan pada akhirnya neraca antara impor alutsista dan ekspor alutsista akan berimbang di masa depan.

e. **Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Industri Pertahanan Meningkat.**

Indonesia hendaknya meningkatkan intensitas kerjasama industri pertahanan dengan negara-negara lain. Untuk itu, dibutuhkan pemantapan situasi di dalam negeri, dalam arti adanya suatu kebijakan nasional dan kemampuan industri pertahanan nasional yang kondusif bagi dilaksanakannya kerjasama tersebut. Kebijakan alih teknologi yang dicanangkan oleh pemerintah mesti didukung oleh kesiapan internal Indonesia sendiri. Selain itu, Indonesia perlu lebih banyak menggagas kerjasama desain, rancang bangun dan produksi bersama alutsista dengan negara-negara lain. Sebab model kerjasama demikian lebih memberikan peluang bagi terlaksananya kerjasama alih teknologi.

5. **Upaya upaya dalam meningkatkan kerjasama Pertahanan.** Untuk meningkatkan kerjasama pertahanan Indonesia dalam rangka menjaga stabilitas kawasan, perlu dilaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Kementerian Pertahanan menyusun suatu agenda rencana aksi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertahanan di bidang diplomasi. Seperti penerapan manajemen modern. Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan kerjasama guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertahanan di bidang diplomasi. Kementerian Pertahanan menyelenggarakan suatu jenjang pendidikan atau kursus yang diikuti oleh PNS terkait dan personel TNI yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertahanan di bidang diplomasi. Kementerian Pertahanan meningkatkan prasyarat dalam rekrutmen sumberdaya manusia, khususnya Pegawai Negeri Sipil dan mengadakan peningkatan profesionalisme.

b. Kementerian Pertahanan menjalin kerjasama dengan Kementerian Pertahanan negara lain guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertahanan di bidang diplomasi lewat kegiatan pelatihan, kursus dan lain sebagainya. Kementerian Pertahanan dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan mengirimkan personel-personel secara aktif untuk mengikuti berbagai forum regional dan international. Kementerian Pertahanan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertahanan di bidang diplomasi. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI menyelenggarakan suatu kegiatan bersama secara rutin yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertahanan di bidang diplomasi. Kementerian Pertahanan melakukan uji kompetensi secara rutin kepada personel Kementerian Pertahanan khususnya untuk menguji kecakapan mereka di bidang diplomasi. Kementerian Pertahanan menyusun silabus mengenai pendidikan, pelatihan dan kursus di bidang diplomasi pertahanan. Kementerian Pertahanan menyediakan suatu beasiswa khusus di bidang diplomasi pertahanan yang dapat dimanfaatkan oleh personel TNI dan PNS Kementerian Pertahanan untuk belajar diplomasi di perguruan tinggi terkemuka di dalam dan luar negeri. Kementerian Pertahanan membentuk suatu Pusat Pendidikan di lingkungan Badan Pendidikan dan Latihan yang khususnya menangani tentang diplomasi pertahanan.

c. Kementrian Pertahanan, Mabes TNI dan negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia meningkatkan pola dan metode kerjasama. Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas memastikan tersedianya alokasi dana bagi modernisasi kekuatan sesuai dengan

MEF. Dengan berpedoman pada kebijakan tersebut telah dilaksanakan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang menghambat pembangunan dan pengembangan kemampuan pertahanan negara. Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan negara-negara lain untuk memodernisasi alutsista pertahanan, baik melalui kegiatan pembelian alutsista, lisensi, imbal beli, *co-production* maupun *offset*.

d. Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan Kementerian BUMN terus mendorong dan mengawasi pencapaian terhadap revitalisasi industri pertahanan. Kementerian Pertahanan mendorong Kementerian Keuangan untuk memberikan insentif khusus bagi industri pertahanan nasional yang berkontribusi besar bagi modernisasi alutsista pertahanan. Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan BUMN industri pertahanan dalam rangka modernisasi alutsista pertahanan. Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya dalam modernisasi alutsista pertahanan seperti : Lapan, PT. Len Industri, PT Pindad, PT PAL, PT Dahana dan lain lain. Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam rangka mendukung pembiayaan modernisasi alutsista pertahanan.

e. Kementerian Pertahanan dan Kementerian BUMN memfasilitasi kerjasama BUMN industri pertahanan dengan industri pertahanan asing dalam rangka mendukung modernisasi alutsista pertahanan. Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Riset dan Teknologi bekerjasama untuk mempercepat modernisasi alutsista pertahanan melalui kerjasama di bidang teknik yang melibatkan BUMN industri pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri bekerjasama untuk mendorong realisasi sejumlah perjanjian antara Indonesia dengan negara-negara lain yang menyepakati kerjasama teknologi pertahanan. Kementerian Pertahanan meningkatkan peran dan tugas Sekjen memerlukan upaya yang dinamis dan proaktif guna dapat memastikan tuntutan tugas rutin, tugas perumusan kebijakan dan tugas dinamika lain yang diselenggarakan oleh Kemhan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna khususnya yang berhubungan dengan biro perencanaan.

f. Kementerian Pertahanan memasukkan agenda evaluasi kebijakan diplomasi pertahanan sebagai bagian dari program kerjanya. Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri melakukan evaluasi terhadap

kebijakan diplomasi pertahanan yang selama ini berjalan. Kementerian Pertahanan melibatkan kalangan masyarakat akademisi dari perguruan tinggi guna melaksanakan evaluasi terhadap diplomasi pertahanan. Kementerian Pertahanan menyusun suatu parameter yang terukur dalam melaksanakan evaluasi terhadap diplomasi pertahanan dan melaksanakan modifikasi metode anggaran. Kementerian Pertahanan diberi kewenangan untuk menangani sepenuhnya urusan Atase Pertahanan yang selama ini berada di bawah BAIS TNI guna mengoptimalkan diplomasi pertahanan.

g. Kementerian Pertahanan bersama dengan Mabes TNI, Mabes TNI Angkatan Darat, Mabes TNI Angkatan Laut dan Mabes TNI Angkatan Udara duduk bersama untuk mengevaluasi internal Kemhan-TNI mengenai kerjasama pertahanan yang selama ini telah terjalin dengan negara-negara lain. Kementerian Pertahanan menerbitkan Cetak Biru Diplomasi Pertahanan setelah melalui proses penyusunan yang melibatkan masukan semua pemangku kepentingan diplomasi pertahanan. Kementerian Pertahanan melakukan sosialisasi tentang diplomasi pertahanan kepada semua pemangku kepentingan secara rutin per tahun untuk mendapatkan masukan-masukan tentang pelaksanaan diplomasi pertahanan ke depan. Kementerian Pertahanan mendorong peran aktif dari lembaga-lembaga pemikiran (*think tank*) pertahanan dan keamanan di Indonesia agar lebih aktif dalam memberikan kontribusi pemikiran alternatif terhadap pelaksanaan diplomasi pertahanan.

h. Kementerian Pertahanan mendorong pembentukan Pusat Diplomasi Pertahanan Nasional yang berada di bawah Kementerian Pertahanan sebagai wadah untuk mengembangkan pemikiran tentang diplomasi pertahanan Indonesia. Kementerian Pertahanan mengoptimalkan peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) seperti: Propatria Institute, Pacivis UI, Ridep Institute, Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) dalam evaluasi reformasi pertahanan.

i. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI mengadakan evaluasi pelaksanaan kerjasama pertahanan khususnya mengoptimalkan kerjasama bidang pertahanan di wilayah perbatasan sesuai dengan bidang intelejen, operasi dan latihan, personel dan logistik.



## 6. Kesimpulan

a. Indonesia sebagai salah satu negara kunci dalam stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara harus senantiasa melakukan optimalisasi terhadap diplomasi pertahanan yang dilaksanakan agar selaras dengan ancaman dan tantangan yang berkembang. Terkait dengan hal tersebut, kerjasama pertahanan Indonesia hendaknya dapat memainkan peran lebih besar dan konstruktif di kawasan dalam rangka memproyeksikan kepentingan nasional. Untuk itu, dibutuhkan sejumlah terobosan untuk mengoptimalkan diplomasi pertahanan, yakni melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertahanan, peningkatan kemampuan alutsista pertahanan dan terlaksananya evaluasi kebijakan pertahanan guna mendukung diplomasi pertahanan dalam rangka mewujudkan stabilitas kawasan. Terobosan tersebut harus dilaksanakan ketika ini atmosfir kerjasama pertahanan di kawasan lebih mengedepankan kerjasama pertahanan multilateral daripada kerjasama pertahanan bilateral belaka.

b. Guna mengoptimalkan kerjasama pertahanan Indonesia di kawasan Asia Tenggara, dibutuhkan adanya suatu pembenahan internal yang mengikat semua pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait itu menyangkut Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan TNI itu sendiri. Salah satu pembenahan internal yang dibutuhkan adalah terciptanya kesamaan persepsi menyangkut optimalisasi kerjasama pertahanan.

c. Secara internal antara Kementerian Pertahanan dan TNI seyogyanya ada suatu tinjauan berkala terhadap kebijakan kerjasama pertahanan. Sedangkan secara eksternal, Kementerian Pertahanan harus senantiasa menyelaraskan kebijakan kerjasama pertahanan sebagai bagian dari diplomasi pertahanan dengan kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri. Keselarasan kedua kebijakan itu secara makro akan meningkatkan kinerja diplomasi Indonesia di kawasan Asia Tenggara sekaligus berkontribusi terhadap stabilitas keamanan kawasan.

## 7. Saran.

a. Kementerian Pertahanan sebagai ujung tombak diplomasi pertahanan Indonesia sebaiknya menyusun suatu program kerja jangka menengah mengenai

diplomasi pertahanan. Eksistensi program kerja itu dibutuhkan agar langkah-langkah yang ditempuh dalam diplomasi pertahanan tidak terkesan sekedar mengulang pola lama dan sebaliknya miskin terobosan baru yang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Dalam peningkatan kerjasama pertahanan tersebut tersebut, Kementerian Pertahanan melibatkan TNI untuk dimintai saran, masukan dan pendapatnya, mengingat TNI adalah salah satu aktor dalam implementasi diplomasi pertahanan. Dengan demikian, kontribusi kerjasama pertahanan dalam diplomasi pertahanan Indonesia akan lebih efektif dibandingkan sebelumnya dan akan berdampak positif terhadap stabilitas keamanan kawasan.

b. Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri sebagai *Leading Sector* diplomasi pertahanan hendaknya dalam setiap kerjasama pertahanan dalam bentuk operasi maupun latihan yang di gelar oleh TNI, masing masing mengikutkan perwakilan personelnnya sebagai *observer*, Hal ini bertujuan untuk memudahkan evaluasi yang dilakukan bersama antara Mabes TNI, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri.

c. Mabes TNI, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri segera menggagas latihan multilateral di Indonesia setingkat *Kakadu*, *RIMPAC* atau *Cobra Gold*. Disamping untuk meningkatkan CBM serta meningkatkan daya saing dan daya tawar diplomasi pertahanan Indonesia juga akan meningkatkan devisa negara dan ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Boer Mauna, Diplomasi dan Hukum Diplomatik, Pusat Pendidikan dan Latihan Departemen Luar Negeri, Jakarta, Maret 2001, hal. 3.

Badri, Jusuf, Kiat Diplomasi: Mekanisme dan Pelaksanaannya. Jakarta: Sinar Harapan, 1994 hal.16

UU RI No. 3 tahun 2002, "Tentang Pertahanan Negara", pasal 1.

Dephan, Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21, Jakarta 2008, hal. 34.

G.R. Berriedge, Diplomacy: Theory and Practice, Prentice Hall, New York, 1995

Morgenthau, Hans, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, Fifth Edition, Revised, New York: Alfred A. Knopf, 1973

SOEWARSO, MSc, Laksamana muda TNI, "Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Pertahanan Keamanan Matra Laut", Seskoal, Jakarta, Juli 1986, hal.6.

Seskoal. November 2003, "Analisis Ancaman", Jakarta, Paket Instruksi BS Strategi, hal. 18.

Seskoal. PI. MA. "Strategi Nasional dan Strategi Besar", hal. 41.

Soewarso, "Ketahanan Nasional ,PI", Seskoal, Jakarta, 2001, hal 3.

The Ministry of Defence Policy Papers, Paper No.1 Defence Diplomacy, hal.2

Tim Pro Patria Institute, Mencari Format Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara; Jakarta, Pro Patria, 2006, hal. 6.

United States National Security Strategy, May 2010, hal.17

U.S. Department of Defense, Annual Report to Congress: Military Power of the People's Republic of China 2009, hal.2

Office of Naval Intelligence, China's Navy 2007, hal.2.

[www.depdagri.go.id](http://www.depdagri.go.id)

[www.dephan.go.id/poehan/pengertian.htm](http://www.dephan.go.id/poehan/pengertian.htm)

[www.dpr.go.id/.../K1\\_kunjungan\\_Negara\\_Amerika](http://www.dpr.go.id/.../K1_kunjungan_Negara_Amerika)

<http://id.erita.yahoo.com/china-harapkan-filipina-jaga-stabilitas-kawasan-155720676.html>

[http://www.dephan.go.id/buku\\_putih/bab\\_v.htm](http://www.dephan.go.id/buku_putih/bab_v.htm)

<http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/139-diplomasi-agustus-2011/1174-arf-kontributor-bagi-pemeliharaan-harmoni-dan-stabilitas-kawasan-asia-pasifik.html>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan\\_luar\\_negeri](http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_luar_negeri)

<http://www.scribd.com/doc/17598286/Perjanjian-Internasional-Dalam-Teori-Dan-Praktek-Di-Indonesia-Kompilasi-Permasalahan>

<http://www.tempo.co.id/harian/profil/prof-alatas.html>

<http://www.thejakartapost.com/news/2009/12/15/arf-experts-design-work-plan-preventive-diplomacy.html>

<http://www.antaraneews.com/print/1144140449/panglima-tni-kerjasama-militer-ri-australia-tetap-baik>

[http://indonesiandefense.blogspot.com/2010/09/melihat-pertahanan-dan-kekuatan\\_04.html](http://indonesiandefense.blogspot.com/2010/09/melihat-pertahanan-dan-kekuatan_04.html)

<http://www.kemlu.go.id/sanfrancisco/Pages/News.aspx?IDP=5544&l>

[http://indonesiandefense.blogspot.com/2011\\_05\\_15\\_archive.html](http://indonesiandefense.blogspot.com/2011_05_15_archive.html)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Jumlah\\_pulau\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Jumlah_pulau_di_Indonesia),

<http://www.detiknews.com/read/2011/08/05/193407/1697777/10/kerugian-negara-di-sektor-perikanan-capai-rp-218-triliun>